



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN**

LAPORAN AKHIR KEHUMASAN



 bawaslukabkatingan@gmail.com

 katingan.bawaslu.go.id

 Jl. Soetoyo S Kereng Humbang
Kasongan Lama

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nyalah kami bisa menyelesaikan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2022.

Pada era informasi ini, fungsi kehumasan telah menjadi semakin strategis. Ia tidak lagi menjadi supporting unit yang hanya memberikan informasi satu arah kepada public tanpa strategi dan perencanaan matang. Justru, kehumasan telah menjadi entitas memegang kunci pada reputasi instansi. Pada Lembaga pengawas, hal ini membuat kehumasan berdiri di garis terdepan dalam membangun hubungan baik, konstruktif dan kolaboratif dengan Lembaga lain serta masyarakat luar khususnya.

Ucapan terimakasih dan apresiasi kepada seluruh staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan yang telah membantu kinerja dari Divisi Humas dan telah membantu penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu segala kritik dan saran dari seluruh pembaca sangatlah kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga sebagai acuan kebijakan Bawaslu Kabupaten Katingan untuk peningkatan kinerja kehumasan dimasa yang akan datang.

Kasongan, 23 Desember 2022

BAWASLU KABUPATEN KATINGAN

Ketua,



YOSAFAT ERICKTOVIA KAWUNG, SH., MH

Abstrak

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2022 ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami juga berterimakasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dan membantu kami dalam menyelesaikan laporan ini. Program/kegiatan kehumasan tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Bawaslu Kabupaten Katingan telah melaksanakan serangkaian kegiatan berdasarkan tahapan-tahapannya, mulai tahapan sosialisasi, bimbingan teknis dan lainnya. Pemilihan Umum 2024 merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan Pemimpin yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilihan Umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas guna memastikan terpenuhinya prinsip demokrasi dalam keseluruhan proses dan hasil Pemilihan Umum. Tanpa berpretensi terlebih dahulu mengenai proses, hasil dan kualitasnya, berikut ini laporan akhir Kehumasan Tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak sebagai dokumentasi, informasi dan bahan studi untuk perbaikan-perbaikan dan kebijakan menyempurnakan proses kehumasan dimasa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan yang meliputi pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat dan hubungan media massa Bawaslu Kabupaten Katingan. Laporan ini kami susun sesuai pedoman Pelaporan yang telah ditetapkan Bawaslu melalui Surat Edaran Nomor:717/HM/K1/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2022.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	3
B. Maksud dan Tujuan.....	Error! Bookmark not defined.
C. Program Kerja Humas Bawaslu Katingan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II PROGRAM KHUSUS.....	Error! Bookmark not defined.
A. PROGRAM KEGIATAN.....	Error! Bookmark not defined.
B. PROGRAM KERJA KEHUMASAN	Error! Bookmark not defined.
C. PENYAMPAIAN INFORMASI KE MASYARAKAT/PUBLIK.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENGAKUAN/PENGHARGAAN DARI PIHAK LAIN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengakuan/Penghargaan Dari Pihak Lain	Error! Bookmark not defined.
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan dan Saran.....	69

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. 1 Peta Geografis Wilayah Kabupaten Katingan ..**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 2 Screenshot Situs Website Bawaslu Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 3 Screenshot Situs Website Bawaslu Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 4 Screenshot Facebook Bawaslu Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 5 Screenshot Instagram Bawaslu Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 6 Himbauan Netralitas ASN dalam Pilkada 2022 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 7 Screenshot Tweeter Bawaslu Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 8 Himbauan Tolak Politik Uang dan Protokol Kesehatan dalam Pilkada 2022**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 9 Himbauan Wajib Masker.....**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 10 Ucapan Perayaan Hari Besar Gong Xie Fa Cai **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 11 Ucapan Perayaan Hari Besar Perayaan Nyepi**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 12 Bawaslu Kabupaten Katingan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama dengan Stakeholder**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 1. 13 Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Pengembangan**Error! Bookmark not defined.**
-
- Gambar 3. 1 Apresiasi Bupati Katingan atas kinerja Bawaslu Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 2 Penghargaan dari KPU Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 3 Penghargaan dari KPU Kabupaten Katingan**Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 3. 4 Penghargaan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah yang diserahkan Oleh KPU Katingan.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kegiatan Bawaslu Kabupaten Katingan.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pemilihan Umum dalam Negara Demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara konstusional yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

Sebuah negara berbentuk Republik memiliki sistem pemerintahan yang tidak pernah lepas dari pengawasan Rakyatnya. Adalah Demokrasi, sebuah bentuk pemerintahan yang terbentuk karena kemauan rakyat dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi merupakan sebuah proses, artinya sebuah republik tidak akan berhenti di satu bentuk pemerintahan selama rakyat negara tersebut memiliki kemauan yang terus berubah. Ada kalanya rakyat menginginkan pengawasan yang superketat terhadap pemerintah, tetapi ada pula saatnya rakyat bosan dengan para wakilnya yang terus bertingkah karena kekuasaan yang seakan-akan tak ada batasnya.

Penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu faktor *fundamental* dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat, dan berkualitas. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan sebagai penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum saja, tetapi juga terikat oleh Undang-Undang lainnya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dalam mewujudkan visi dan misi, secara konsisten Bawaslu

Kabupaten Katingan terus berupaya untuk menjadi lembaga yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Bawaslu Kabupaten Katingan, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan menyediakan sarana pelayanan informasi, PPID Bawaslu Kabupaten Katingan juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana media elektronik dan non-elektronik, diantaranya dengan melalui sarana secara *online* pada *Website* Bawaslu Kabupaten Katingan. Dengan adanya sarana tersebut, maka akan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tentu akan mengelola berbagai macam Informasi Publik, baik yang diperoleh dari hasil pencegahan, pengawasan, penindakan, penyelesaian sengketa dan data Badan Publik lain yang dipergunakan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se- Kalimantan Tengah dalam mendukung tugas-tugasnya. Informasi Publik tersebut tentu sangat dibutuhkan oleh peserta pemilu, pemangku kepentingan pemilu dan masyarakat luas. Sebagaimana telah menjadi komitmen Bawaslu Kabupaten Katingan untuk terbuka, akuntabel dalam rangka menegakkan keadilan Pemilu.

B. Tujuan Laporan

Laporan ini disusun merupakan hasil dari Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022. Laporan ini bertujuan memberikan gambaran Kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Katingan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, laporan ini memberikan gambaran secara teknis pelaksanaan kehumasan tahun 2022.

C. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Katingan berpedoman kepada beberapa aturan hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang no 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 (Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Dan Bawaslu Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11470);
- d. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor: 717/HM/K1/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Surat Pengumpulan Laporan.

D. Sistematika Laporan

Dalam menyusun laporan akhir hasil Kehumasan pada 2022 Bawaslu Kabupaten Katingan berpedoman kepada Surat Instruksi Bawaslu RI tanggal 21 Desember 2022 Nomor: 717/HM/K1/12/2022 perihal Surat Pengumpulan Laporan Akhir Kehumasan Tahun 2022. Adapun Sistematika pada penyusunan laporan ini yakni sebagai berikut.

1. **BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum, tujuan laporan, landasan hukum dan sistematika laporan.
2. **BAB II KEBIJAKAN KEHUMASAN** Pada bab ini diuraikan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi serta kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan.

3. **BAB III PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN** Pada bab ini disebutkan dan dijelaskan bagaimana pengelolaan publikasi melalui media social dan pemberitaan melalui website.
4. **BAB IV PENUTUP** Pada bab ini diuraikan kesimpulan kinerja Humas Bawaslu Kabupaten Katingan dan rekomendasi untuk langkah di masa mendatang yang akan dilakukan atau direncanakan atau meningkatkan kinerjanya.

BAB II

KEBIJAKAN KEHUMASAN

A. Sarana dan Prasarana

Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik, sarana dan prasarana tentu menjadi salah satu komponen yang harus diperhatikan dan digiatkan. Layanan Informasi Publik Secara Online merupakan salah satu faktor penting yang tak boleh dihiraukan, aktivitas publik menggunakan mobile harus mudah untuk diakses secara online.

- **Website**

Memasuki era milineal seperti sekarang ini, sajian data maupun informasi dituntut untuk dapat diakses semudah dan secepat mungkin. Melalui website, PPID Bawaslu Kota Surakarta tentu selangkah lebih maju dalam memberikan pelayanan kepada publik. Untuk meningkatkan kredibilitas lembaga, Bawaslu Kota Surakarta telah merelease website lembaga Bawaslu Kota Surakarta. Isi dari website lembaga ini mencangkup hasil kinerja melalui berita aktual dan terupdate.

- **Email**

Selain ketiga media tersebut diatas, masyarakat juga memohonkan informasi melalui email. Seluruh permohonan informasi melalui sarana dan prasarana yang disediakan akan dilayani oleh petugas pelayan PPID Bawaslu Katingan sebagai tanggung jawab dan kewajiban keterbukaan informasi kepada publik.

- **Media Sosial**

Sebagai Sarana Penunjang Keterbukaan Informasi Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media baik media massa maupun media sosial mengalami loncatan kemajuan yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Saat ini media sosial hampir pasti menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Hampir disetiap kehidupan baik individu maupun secara berkelompok, masyarakat sangat

membutuhkan media sosial dan media telekomunikasi dan informasi. Perkembangan media tersebut lebih banyak dipicu oleh banyaknya kebutuhan akan informasi yang cepat akurat dan dapat di percaya. Dalam perkembangan budaya dan teknologi tidak terlepas dari media yang ada. Bahkan media sosial sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan budaya manusia saat ini. Setiap orang sangat membutuhkan media sosial ini. Informasi yang ada di media sosial menjadi kebutuhan pokok bagi individu, masyarakat, organisasi bahkan budaya suatu daerah. Begitu pentingnya peran Kehumasan dalam bermedia sosial ini tak terlepas dari kebutuhan manusia akan informasi. Peran Kehumasan dalam membuat informasi di media sosial sangat menyentuh pada segala aspek kehidupan di masyarakat. Peran ini pun terasa pada dimensi politik khususnya pada proses Pemilihan Umum. Kajian peran Kehumasan dalam menginformasikan berita di suatu media. Disatu sisi media merupakan media sosial dimana berperan sebagai alat edukatif, interaksi sosial dan komunikasi.

B. Sumber Daya Manusia

Secara operasional PPID Bawaslu Katingan dikelola oleh SDM yang terdiri dari Pejabat Struktural dan Staf/Fungsional (Sesuai dengan SK Bawaslu Kabupaten Katingan Nomor : 006/HK.01.01/K.KH-06/06/2022 adalah sebagai berikut:

- Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan (Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH) selaku Pembina PPID
- Koordinator Sekretariat Bawaslu Katingan (Irwanto, S.Si) selaku Atasan PPID
- Bendahara Pengeluaran Pembantu (Fahrozi) selaku PPID
- Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas (Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd) selaku Tim Pertimbangan PPID

- Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd) selaku Tim Pertimbangan PPID
- Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (Novi Shintya, S.Kom) Petugas Pelayanan Informasi
- Staf Bagian Hukum, Pencegahan, Humas dan Parmas (Eko Susanto) Petugas Pelayanan Informasi
- Staf Bagian SDMO, Data dan Informasi (Fettri Wulandari, S.Pd) Petugas Pelayanan Informasi
- Staf Bagian Keuangan (Novi Yuliantie, S.IP) Petugas Pelayanan Informasi

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi penting dilaksanakan dalam rangka memantau perkembangan Humas yang berkaitan dengan website, media sosial dan juga data informasi lembaga Bawaslu. Humas Bawaslu Kabupaten/Kota harus aktif memanfaatkan semua sarana dan prasarana yang ada untuk memaksimalkan pemberitaan seluruh kegiatan pengawasan pada tahapan pemilu serentak tahun 2024. Selama ini Bawaslu Kabupaten Katingan sudah sangat aktif dan telah maksimal melakukan pemberitaan di lingkungan Bawaslu. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya SDM tidak menjadi kendala menurunnya kinerja kehumasan, semua harus kerjasama dalam memaksimalkan publikasi di Bawaslu. Dari media social dan website yang sudah ada sudah dimaksimalkan, dan dengan adanya tahapan kita harus memaksimalkan lagi penggunaan media social dan website. Selain itu admin social media dan website harus paham dengan trend yang ada saat ini sehingga sasaran untuk menyampaikan info kepada masyarakat dapat tersalurkan. Selain itu, kita harus memaksimalkan kecepatan dalam menaikkan berita pada saat adanya suatu kegiatan.

D. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan Kapasitas Kehumasan perlu dalam Optimalisasi Penggunaan Media Sosial dan Website Tim Kehumasan Bawaslu Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah. Peran Humas menjadi cukup strategis dan penting dimana melalui informasi dan pemberitaan yang menarik ini, kita bisa gunakan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Humas Bawaslu dapat melakukan revitalisasi dengan melakukan perombakan pola dan tradisi lama sehingga Humas Bawaslu dapat beralih ke pola dan tradisi baru dengan terus berupaya menyampaikan informasi secara cepat dan tepat sehingga kebutuhan informasi dapat diakses oleh masyarakat. Berikut kegiatan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan.

1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Pemilih Pemula Di Kabupaten Katingan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepada Pemilih Pemula Kabupaten Katingan di SMA Negeri 2 Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber dari Ketua KPU Kabupaten Katingan Subandy, dan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dengan peserta dari siswa kelas XI dan XII.



Gambar 1. Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Kepada Pemilih Pemula Di Kabupaten Katingan

Salah satu elemen suksesnya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yaitu adanya partisipasi masyarakat sebagai wajib pilih dan itu termasuk ada pada adik-adik sebagai pemilih pemula. Nantinya adik-adik menjadi agen pengawasan kami di Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adik-adik sekalian yang akan memberikan pemahaman dan penjelasan kepada wajib pilih, kepada masyarakat maupun kepada keluarga sesuai mengikuti kegiatan ini, hal itu disampaikan oleh ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan pada saat pembukaan kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum Partisipatif bagi Pemilih Pemula. Lanjut lagi, Pengetahuan pemilihan yang baik atau proses demokrasi yang baik itu juga harus ditanamkan sejak dari bangku sekolah, karena adik-adiklah yang kemudian akan meneruskan estafet kepemimpinan di daerah kita khususnya Kabupaten Katingan. “selain dibangku sekolah, maka pendidikan politik itu harus diajarkan dan harus diperkenalkan juga dengan lingkungan keluarga, nanti adik-adik sekalian dapat memberikan penguatan, pendidikan politik kepada orang tua, kepada adik-adik kita sekalian selepas mengikuti kegiatan ini. Pengalaman kita ditahun 2019, ada banyak pelanggaran yang terjadi dan kemudian akan berpotensi pada pemilihan legislatif dan Pemilihan Umum di tahun 2024.

Banyak potensi pelanggaran yang terjadi misalnya politik uang, politisasi sara, netralitas ASN maupun kampanye hitam, maka diharapkan melalui sosialisasi ini, adik-adik sekalian yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun keluarga dan lingkungan sekitar kita. Bahwa praktek uang harusnya tidak boleh lagi terjadi di Pemilihan Umum tahun 2024, tentunya sangat penting adik-adik mempunyai semangat yang sama dengan kami penyelenggara Pemilihan Umum supaya memastikan proses pemilihan umum dan

pemilihan kepala daerah di tahun 2024 bisa berjalan secara maksimal tanpa adanya kecurangan.

2. Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Katingan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas bersama anak-anak penyandang disabilitas dan pendamping dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Katingan, Dinas Sosial Kabupaten Katingan, dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan.



Gambar 2. Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas di Kabupaten Katingan

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Widiyanto, BA, Kepala Bagian Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Jimmy Anwar, S.STP., M.Si, Anggota KPU Kabupaten Katingan M. Al-Kustari, S.Pd.I, serta Anggota dan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia kawung, SH., MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya kami dalam menjaga keadilan Pemilihan Umum bagi kaum disabilitas khususnya di Kabupaten Katingan, diharapkan agar hak pilih yang memiliki keterbatasan fisik tetap tersalurkan saat pelaksanaan Pemilihan Umum dan pilkada mendatang agar terwujudnya Pemilihan Umum dan pilkada yang jujur, adil, bermartabat, berkualitas dan berintegritas.

Dilanjutkan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Widiyanto, BA mengapresiasi atas diadakannya kegiatan ini. Menurutnya Selain bisa bersilaturahmi, perwakilan kelompok disabilitas bisa mengetahui hak-haknya sebagai warga negara itu sama dengan masyarakat pada umumnya. Hak suara yang sama dalam menentukan pilihan, menentukan pemimpin kedepan, ujar beliau.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah serta narasumber kegiatan Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM, memotivasi peserta disabilitas bahwa meskipun disabilitas, jasmaninya terbatas namun suara kita sama satu. "Saya sangat mendukung dan memperjuangkan penyandang disabilitas dalam menentukan hak pilihnya, dan saya berharap di Pemilihan Umum dan Pilkada mendatang, fasilitas dan akses disabilitas akan lebih ramah lagi terhadap kaum disabilitas, pungkasnya". Sementara Anggota KPU Kabupaten Katingan M. Al-Kustari, S.Pd.I, selaku Narasumber kegiatan menjelaskan terkait data pemilih, hak pemilih serta tahapan Pemilihan Umum yang akan dilakukan pada tahun 2024. Sosialisasi ini diadakan dalam upaya mengawal dan menjaga keadilan Pemilihan Umum diseluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kelompok disabilitas dengan ragam disabilitasnya.

3. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 Dengan Tema “Merawat Demokrasi Dengan Melawan Politik Identitas Dan Menjaga Netralitas ASN”

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan menggelar Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Jumat, 12 Agustus 2022).

Kegiatan kali ini sengaja mengambil segmentasi Pemerintah Kabupaten Katingan dan tokoh masyarakat, pasalnya tema yang diambil dalam sosialisasi tersebut mengangkat tema merawat demokrasi dengan melawan politik identitas dan menjaga netralitas ASN. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Katingan Yosafat Ericktovia Kawung pihaknya memprediksi politik identitas dapat menjadi tren pelanggaran yang semakin marak digunakan dalam pesta demokrasi di Kabupaten Katingan. Politik identitas secara sederhana bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada perbedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya.



Gambar 3. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 Dengan Tema “Merawat Demokrasi Dengan Melawan Politik Identitas Dan Menjaga Netralitas ASN”

“Politik Identitas merupakan upaya mengkampanyekan seseorang tidak layak menjadi pemimpin karena identitasnya, sedangkan jika seseorang memilih atas dasar kesamaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dengan tidak mengadu-adukan perbedaan itu bukanlah politik identitas,” jelasnya.

Untuk menekan masifnya politik identitas, pihaknya meminta dukungan semua pihak terutama tokoh masyarakat, adat dan agama bisa mensosialisasikan pentingnya kedewasaan berdemokrasi. “Para tokoh nasional, pemuka agama, elite politik semua sepakat menyatakan menolak politik identitas, karena politik identitas bisa merusak kehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya. Di samping itu, dia juga mengaku dari setiap pelaksanaan Pemilihan Umum dari tahun ketahun memang ada trend peningkatan pelanggaran netralitas ASN. “Untuk Kabupaten Katingan pelanggaran hanya terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018, Pemilihan Umum tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 setelahnya kita tidak menemukan lagi. Harapan kita untuk Pemilihan Umum ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi pelanggaran Netralitas ASN, jadi kami dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tidak menindak lagi” pintanya.

Di tempat yang sama Bupati Katingan Sakariyas mengingatkan kepada seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya dari hal-hal yang dilarang bagi ASN seperti terlibat dalam tim sukses, menyampaikan visi dan misi kandidat di medsos atau sekedar melakukan swafoto bersama. “ASN harus taat dan patuh pada aturan yang ditetapkan jika terbukti melanggar. Saya akan memberi tindakan tegas agar tidak ditiru oleh ASN yang lain,” beliau juga mengingatkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dan KPU Kabupaten Katingan untuk dapat memastikan hak-hak politik

masyarakat terjamin dan menjadi wasit yang menjaga profesionalitas dan independensinya sehingga Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 berlangsung dengan baik.

4. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Tema “Mendorong Partisipasi Generasi Muda Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024”



Gambar 4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan Tema “Mendorong Partisipasi Generasi Muda Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024”

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 dengan Tema : Mendorong Partisipasi Generasi Muda Dalam Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 di Aula Losmen Citra Katingan pada hari Kamis, 13 Oktober 2022. Dalam Kegiatan ini Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M. Koordiv. Pencegahan, Partisipasi

Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat hadir sebagai Narasumber sekaligus membuka Kegiatan. Turut Hadir juga Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2017-2022 Tity Yukrisna, S.Sos., M.AP dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2012-2017 Lery Bungas sebagai Narasumber. Peserta dari Kegiatan ini terdiri dari KNPI, HMI, Pemuda Katolik Kasongan, DPK Peradah, SPRP Resort GKE Kasongan, Pemuda Mesjid, OSIS SMAN-1, OSIS SMAN-2, OSIS SMKN-2, OSIS SMA Muhammadiyah, OSIS SMA Kristen, BEM Universitas Darwan Ali, BEM Universitas Muhammadiyah, Hapakat, Pemuda Pancasila, Alumni SKPP, dan GAMKI yang ada di Kabupaten Katingan.

5. Pengawasan Partisipatif “ Kampung Pengawasan ” di Desa Banut Kalanaman, Desa Tumbang Liting dan Desa Tewang Kadamba.

Guna memaksimalkan peran serta pelibatan masyarakat, Badan Pengawas Pemilihan Umum sedang mematangkan draf Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mengatur mengenai pengawasan partisipatif Kepemiluan. Aturan ini sedianya menjadi payung hukum agar pengawas Pemilihan Umum dapat memaksimalkan berbagai program yang diharapkan bisa menumbuhkan kembangkan kepedulian masyarakat untuk mengawasi Pemilihan Umum. Anggota **Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah** Kalteng Siti Wahidah mengatakan untuk dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum, jajaran pengawas memerlukan peran serta berbagai unsur masyarakat melalui pengawasan partisipatif. “Terbatasnya jumlah personil yang dimiliki jajaran pengawas dan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang cukup sulit, maka diperlukan dukungan masyarakat dalam kerangka masyarakat melek mengawasi karena sejatinya Pemilihan Umum adalah milik rakyat, sehingga mari bersama-sama kita menjaga

dan mengawal proses demokrasi di Indonesia menjadi semakin baik”, pernyataan beliau saat meresmikan Kampung Pengawasan di Desa Banut Kalanaman, pada hari Rabu 23 November 2022. Pada kesempatan yang sama Yosafat Ericktovia Kawung, SH.,MH Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan dalam sambutannya mengatakan bahwa kampung pengawasan lahir dari keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan. “Tidak hanya melalui kampung pengawasan ini saja masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan, karena mulai dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat panitia pengawas Pemilihan Umum *ad-hoc* membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bermitra dalam pengawasan Pemilihan Umum”.



Gambar 5. Pengawasan Partisipatif “ Kampung Pengawasan ” di Desa Banut Kalanaman, Desa Tumbang Liting dan Desa Tewang Kadamba

Sebagai informasi, kampung pengawasan di Kabupaten Katingan diresmikan oleh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kalteng Siti Wahidah dan dihadiri oleh 40 orang tamu undangan yaitu internal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan


Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, Camat Katingan Hilir, Kepala Desa Banut Kalanaman, Tumbang Liting dan Tewang Kadamba, Babinkamtibmas, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat yang berasal desa Tumbang Liting, Tewang Kadamba serta Banut Kalanaman tempat acara berlangsung.


BAB III


PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. Pengelolaan Publikasi melalui Media Sosial

Mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini, Bawaslu Kabupaten Katingan menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Bawaslu Kabupaten Katingan menyebarkan informasi mengenai kegiatan dan informasi kelembagaan Bawaslu Kabupaten Katingan. Media sosial Bawaslu Kabupaten Katingan yang dikelola langsung oleh humas meliputi:

 Facebook : Bawaslu katingan
Jumlah Pengikut : 3.976

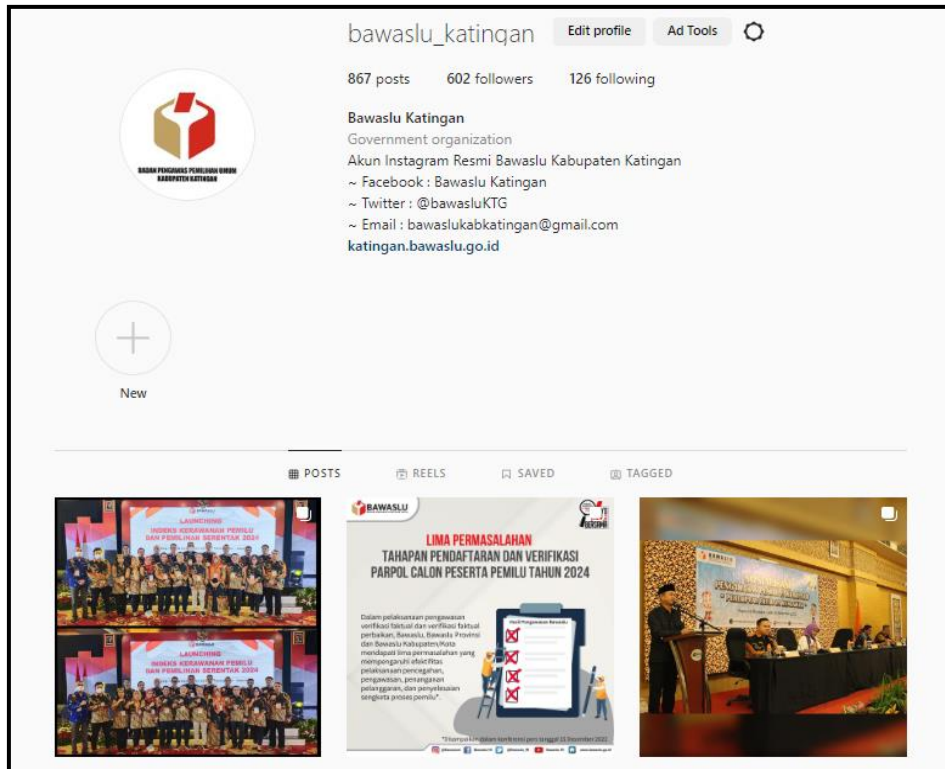
 Instagram : @bawaslu_katingan
Jumlah Pengikut : 602

 Twitter : @bawaslu_ktg
Jumlah Pengikut : 312

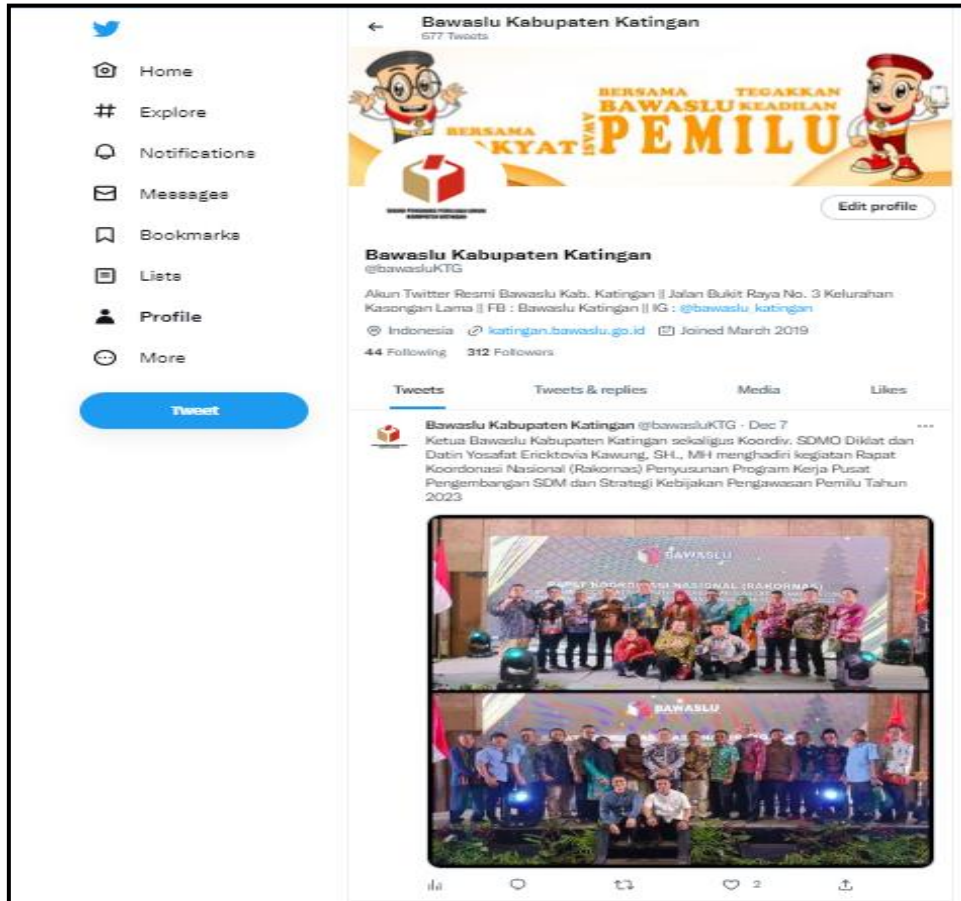
Gambar 6. Screenshot Facebook Bawaslu Kabupaten Katingan



Gambar 7. Screenshot Instagram Bawaslu Kabupaten Katingan



Gambar 8. Screenshot Twitter Bawaslu Kabupaten Katingan



Peran Media Sosial yaitu :

- Memperoleh Publisitas dengan Cakupan yang Lebih Cepat dan Luas
Media sosial memungkinkan berbagi informasi secara instan dengan banyaknya jejaring media sosial itu sendiri, rilis atau cerita dapat dengan mudah diambil dan diposting public.
- Meningkatkan Komunikasi
Situs jejaring sosial memungkinkan Anda untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dengan cepat dari sejumlah pembaca, dengan berbagai antusiasme dan pengalaman.
- Terintegrasi dengan Mudah
Semakin mudah melakukan sosialisasi dan menyampaikan apa yang organisasi inginkan
- Murah, Praktis dan Efisien
Meringankan beban operasional bagi organisasi

Divisi Humas Bawaslu Kabupaten Katingan juga membuat konten media sosial, berupa infografis seperti ucapan peringatan hari-hari besar. Berikut adalah contoh-contoh konten yang telah dibuat dan dipublikasikan di Akun Facebook, Instagram dan twitter Bawaslu Kabupaten Katingan.

Gambar 9. Infografis Ucapan Peringatan Hari-Hari Besar





B. Pengelolaan Pemberitaan Melalui Website

Website Bawaslu Kabupaten Katingan menjadi rumah dari berbagai informasi resmi Lembaga. Website ini telah aktif mulai Maret 2019.

Program kerja Divisi Humas Bawaslu Katingan yang pertama diwujudkan dari peliputan setiap kegiatan yang dilaksanakan. Setelah mendapatkan data pada satu kegiatan, kemudian mengolahnya dalam sebuah berita untuk kemudian dipublikasikan pada akun media sosial. Selama tahun 2022 ini, divisi Humas Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan peliputan dan pemberitaan terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tahun 2022 dan repost dari Bawaslu Kalteng dan Bawaslu RI. Berikut screenshot situs berita website Bawaslu Kabupaten Katingan pada tahun 2022:

- **Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Katingan di Awal Tahun 2022**



Gambar 10. Screenshot Berita Kegiatan Rapat Internal Bawaslu Kabupaten Katingan di Awal Tahun 2022

Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan Rapat Internal dalam rangka Rapat Evaluasi kerja Tahun 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2022. Rapat ini dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan, Rabu (05/01/2022). Dihadiri oleh Ketua, Anggota, dan Plt. Koordinator Sekretariat, serta seluruh jajaran staf sekretariat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

Para pimpinan menyampaikan poin penting yang perlu digarisbawahi. Diawali arahan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH mengenai Pemilu Tahun 2024 mendatang akan dimulai tahapan di tahun 2022. “Meskipun belum resmi pada bulan apa tahapan akan dimulai, kita perlu mempersiapkan diri untuk tahapan di tahun 2022” ungkap Yos. Beliau juga menyampaikan perlu dilakukannya perbaikan dan evaluasi teknis-teknis sebagai penyelenggara dari sisi administrasi dan yang lainnya.

Dalam kesempatan yang sama Koordinator Sumber Daya Manusia dan Organisasi, Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd menerangkan peran Kesekretariatan harus lebih maksimal terutama kedisiplinan bekerja,

serta peran Kehumasan kedepan harus lebih mampu memperkuat citra lembaga. Bagaimana membuat publik tahu akan keberadaan Bawaslu, meliputi tugas, wewenang, program serta capaian-capaian Bawaslu. Seperti menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui website dan media sosial.

Sedangkan Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa, Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd menambahkan agar semua memahami tugas-tugasnya dan tidak hanya tugas masing-masing saja. Beliau juga menerangkan bahwa Divisi HPPS saat ini masih menunggu petunjuk dan arahan dari Provinsi untuk giat-giat kegiatan apa yang harus dilakukan agar terstruktur dan terkonsep dengan maksimal.

Adapun Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan, Ramly, S.P., MM mengakhiri rapat internal dengan memberikan pesan kepada jajaran staf sekretariat. "Saat ini kita berada di tahun 2022. Maka kita harus siap baik tenaga, pikiran, waktu dan selalu menjaga kesehatan. Jangan menunda-nunda pekerjaan, jangan santai untuk pola kerja menghadapi kebutuhan tahapan, karena intensitas waktu dan tenaga akan lebih sangat dibutuhkan untuk mencapai yang terbaik dan berkualitas" pungkasnya.

- **Bupati Katingan menerima Ketua dan Anggota Bawaslu Katingan di ruang kerja Bupati Katingan**



Gambar 11. Screenshot Berita Kegiatan Bupati Katingan menerima Ketua dan Anggota Bawaslu Katingan di ruang kerja Bupati Katingan

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan, Bupati Katingan Sakariyas, SE menerima Ketua dan Anggota Bawaslu Katingan di ruang kerja Bupati Katingan, Selasa (11/01/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH bersama rekan Komisioner mau menyerahkan usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 mendatang.

Yos (sapaan akrabnya) menjelaskan bahwa usulan tersebut telah disusun melalui proses internal bersama Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah yang dirancang secara efektif dan efisien dengan dasar pertimbangan Peraturan Keuangan tentang Tata Pengelolaan Dana Hibah Pilkada serta Kebutuhan Teknis Pengawasan.

Ia mengharapkan Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat bersama-sama dengan Bawaslu Katingan pada saatnya nanti untuk melakukan pencermatan agar perencanaannya dapat berjalan dengan baik sebagai bentuk dukungan terhadap proses demokrasi di Kabupaten Katingan.

Bupati Katingan dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah Bawaslu Katingan yang lebih awal menyerahkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan Tahun 2024 sehingga ada banyak waktu untuk Pemerintah Daerah membahasnya melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Mengakhiri pertemuan tersebut, Bupati Katingan mengatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Katingan merupakan pesta demokrasi masyarakat Katingan dalam menentukan Pemimpin pada periode mendatang. Oleh karena itu, harapan Sakariyas agar Bawaslu

Katingan dapat bekerja secara professional sesuai tupoksi, transparan dan akuntabel.

- **Sekda Kabupaten Katingan Mendukung Persiapan Bawaslu Katingan Menjelang Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024**



Gambar 12. Screenshot Berita Kegiatan Sekda Kabupaten Katingan Mendukung Persiapan Bawaslu Katingan Menjelang Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan, Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH melakukan koordinasi ke Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang, S. Sos terkait persiapan menghadapi Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 di Kantor Bupati Katingan, Kamis (20/01/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Katingan menyerahkan tembusan surat usulan yang sebelumnya sudah diserahkan langsung kepada Bupati Katingan diantaranya berkaitan dengan dukungan personalia, usulan sarana dan prasarana kantor Bawaslu Katingan termasuk juga anggaran dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 mendatang.

Yos (sapaan akrabnya) mengharapkan dukungan Pemerintah Daerah terkait Persiapan Bawaslu Katingan dalam Persiapan menghadapi Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

Sekda Kabupaten Katingan berpendapat sangat mendukung apapun kebijakan Nasional dalam Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 kedepan. “Kita harus ikuti dan berpartisipasi sesuai usulan dari Bawaslu. Nanti usulan ini akan dipelajari dan dibahas entah itu terkait dari segi dukungan anggaran ataupun personel, semoga nanti bisa terealisasi dengan mengacu pada mekanisme yang ada”, ungkap beliau.

Beliau juga menambahkan harapan untuk bawaslu katingan kedepan setara dengan KPU yang ada, Pemerintah Pusat juga segera memperhatikan Bawaslu seperti KPU. Karena kita melihat Lembaga ini sepanjang proses demokrasi ini ada, maka Lembaga ini tetap diperlukan dan sangat dibutuhkan. Pemerintah Daerah tetap juga akan mendukung apapun yang dilakukan Bawaslu Katingan dalam proses Pemilu/Pemilihan Serentak kedepan.

“Harapan saya untuk Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 kedepan, semoga bisa berjalan dengan baik, dan masyarakat bisa memberikan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk mendukung seluruh kegiatan ini. Disamping itu juga Pemerintah Daerah sebagai stakeholder yang juga berperan aktif untuk mensosialisasikan tentang penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2024”, tutup beliau.

- **Mantapkan Persiapan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024**



Gambar 13. Screenshot Berita Kegiatan Mantapkan Persiapan Pengawasan Pemilu/Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

Kasongan – Persiapan Pengawasan Pemilu/Pilkada Serentak Nasional tahun 2024 terus dilakukan oleh Bawaslu Katingan. Selain bersilaturahmi dengan Bupati Katingan beberapa waktu yang lalu, Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH juga bersilaturahmi dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Katingan Marwan Susanto, S.Sos, Senin (17/01/2022).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Katingan menyampaikan bahwa, salah satu bagian penting guna berlangsungnya proses tahapan Pemilu/Pilkada yang demokratis adalah terjalannya koordinasi yang baik dengan stakeholder yang ada karena itu modal utama dalam upaya pemantapan persiapan pengawasan Pemilu/Pilkada Nasional Tahun 2024, yang mana tahapannya akan dimulai pada tahun 2022 ini. Selain itu, Ketua Bawaslu Katingan juga menyampaikan soal usulan anggaran untuk Pilkada 2024, usulan personalia kesekretariatan

dan usulan sarana dan prasarana kantor untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bawaslu Katingan sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Katingan, Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto, S.Sos menyampaikan bahwa, penyelenggaraan Pemilu Serentak Nasional tahun 2024 mendatang adalah penyelenggaraan pemilu yang memiliki tantangan tersendiri. Tantangan-tantangan itu akan dapat diatasi hanya jika ada kolaborasi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, baik itu Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pemilu, Penegak Hukum, Peserta Pemilu dan semua elemen masyarakat Kabupaten Katingan. Sehingga, Pemilu 2024 mendatang dapat terselenggara dengan baik. Dan soal usulan anggaran, dukungan kesekretariatan dan sarana dan prasarana kantor Bawaslu Katingan pada prinsipnya Ketua DPRD Katingan mendukung.

"Apabila yang diusulkan Bawaslu Katingan nantinya perlu persetujuan, saran atau masukan dari DPRD, maka kami (DPRD) siap membahasnya," tutup Marwan.

- **Sah, Pemilu 14 Februari 2024 Disepakati DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu**



Gambar 14. Screenshot Berita Kegiatan Sah, Pemilu 14 Februari 2024 Disepakati DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum - DPR sahkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 14 Februari 2024. Kesepakatan yang diambil bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu tersebut, diambil pada Rapat Dengar Pendapat di Gedung Komisi II DPR, Senin, (24/1/2022).

Ketua Bawaslu Abhan yang juga turut hadir dalam rdp tersebut mengatakan, pada prinsipnya Bawaslu siap melaksanakan pengawasan pemilu dengan skema pelaksanaan pungut hitung pemilu pada 14 Februari 2024 dan pemilihan di 27 November 2024. Lalu pada 15 Mei dan pungut hitung pemilihan 27 November 2024, dan skema lain yang disepakati bersama.

"Kami (Bawaslu) sudah siapkan simulasi kalender pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu," ungkapnya.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan ini diambil setelah para stakeholder melakukan beberapa kali pertemuan pada 2021 lalu. Semua pihak telah kesampingkan ego sektoral masing-masing dan sepakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

"Sesulit apapun situasi kalau semuanya bersama bisa kita atasi. Selama kita solid melangkah akan lebih mudah," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, pemilihan tanggal 14 Februari, memberi ruang yang cukup jika nantinya ada peserta pemilu dalam pilpres mengajukan sengketa dan pilpres digelar dua putaran.

"Pemerintah ingin prinsip efisien terkait anggaran. Ini keputusan bersama yang harus kita jalankan sebaik mungkin," tuturnya.

Sekadar informasi, Abhan turut didampingi tiga pimpinan Bawaslu lain yakni Mochammad Afifuddin, Ratna Dewi Pettalolo, Rahmat Bagja, serta Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswanto. (Sumber : <https://bawaslu.go.id>)

- **BANGUN SINERGITAS, BAWASLU KATINGAN TERIMA KUNJUNGAN DIT INTELKAM POLDA KALTENG**



Gambar 15. Screenshot Berita Kegiatan Bangun Sinergitas, Bawaslu Katingan Terima Kunjungan Dit Intelkam Polda Kalteng

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan - Ketua Bawaslu Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH menerima kunjungan IPDA Wahyu dari Dit Intelkam Polda Kalteng yang hadir bersama 3 anggotanya dan didampingi oleh 2 anggota Sat Intel Polres Katingan.

Hadir bersama Ketua Bawaslu Katingan, diantaranya anggota Bawaslu Katingan Kordiv Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd dan Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd.

Dalam kesempatan ini, Ketua Bawaslu Katingan menyambut baik dan berterima kasih kepada IPDA Wahyu dan rombongan karena sdh berkenan berkunjung ke Bawaslu Katingan.

Menurutnya, sudah barang tentu kedepan Bawaslu Katingan berharap adanya sinergitas yg baik dgn pihak kepolisian agar tahapan pelaksanaan pemilu/pilkada mendatang bisa berjalan dgn baik.

"Sinergitas seperti ini penting untuk dibangun, akan banyak hal yg bisa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dalam rangka kesiapan menyambut pemilu serentak nasional tahun 2024 mendatang".

Ditempat yg sama, IPDA Wahyu menyampaikan harapannya kepada Bawaslu Kabupaten Katingan agar terus memaksimalkan Pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu agar dapat berjalan dengan lancar.

"Harapan kami dari Pihak Kepolisian ke depannya Bawaslu Kabupaten Katingan dapat terus memaksimalkan pengawasan agar pemilu mendatang bisa berjalan dengan lancar".

Selain itu juga dia mengapresiasi kerja-kerja Bawaslu Katingan, karena sejauh ini menurutnya Bawaslu Kabupaten Katingan sudah bekerja secara profesional. Situasi yang kondusif seperti ini dapat terus berlangsung mulai dari tahapan pelaksanaan sampai dengan Pemilu/Pilkada tahun 2024 nanti. Adapun kendala maupun pelanggaran terhadap aturan sudah ada mekanisme penyelesaiannya sendiri, sehingga proses demokrasi ini kedepannya dapat berjalan lancar sesuai peraturan perundang-undangan, tutupnya.

- Webinar Series “Analisis Potensi Sengketa Proses pada Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024”



Gambar 16. Screenshot Berita Kegiatan Webinar Series “Analisis Potensi Sengketa Proses pada Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024”

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan Kegiatan Webinar Series dengan tema “Analisis Potensi Sengketa Proses pada Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024” bersama seluruh Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa, perwakilan Partai Politik, Kejaksaan dan Pihak Kepolisian secara virtual (31/05/2022).

Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH dalam sambutannya mengatakan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya baik Bawaslu Provinsi maupun Kab/Kota merupakan suatu ikhtiar atau upaya Bawaslu untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas serta Pemilu yang

memiliki legitimasi ataupun mendapatkan legitimasi dari seluruh masyarakat.

Anggota Bawaslu Kalteng sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, SH., M.Hum dalam sambutannya sekaligus opening speaker dalam kegiatan mengatakan, potensi diartikan sebagai kemampuan yang mempunyai berbagai kemungkinan ataupun harapan untuk dikembangkan lebih lanjut, baik itu berupa kekuatan, daya ataupun kesanggupan yang diperoleh masyarakat secara langsung ataupun melalui proses yang panjang. Kalaupun ada sengketa, maka sengketa itu merupakan suatu harapan dimana dengan adanya sengketa itu yang menjadi kekuatan, daya ataupun kesanggupan untuk Bawaslu. Disitulah kita bisa menyelesaikan sengketa dengan berkeadilan, ungkapnya.

Sementara itu Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd sekaligus Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (HPPS) dalam paparannya mengatakan bahwa banyak dinamika yang kita hadapi saat menerima proses permohonan penyelesaian sengketa. Jajaran Bawaslu dari Tingkat RI, Provinsi maupun Kabupaten/Kota bahkan sampai tingkat Kecamatan sampai Desa nanti harus lebih terampil lagi, lebih menguasai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan yang selalu diperbaharui terkait dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan kebutuhan Jajaran Pengawas Pemilu ketika berada dilapangan.

Selanjutnya Pelaksana / Analis Sengketa Bawaslu Provinsi Kalteng Suanro, SH., MH menjelaskan jika potensi ada, Bawaslu harus siap untuk menyelesaikan sengketa manakala nanti ada permohonan sengketa yang masuk karena potensi memiliki probabilitas yang tinggi. "Setiap tahapan proses pemilu ada potensi sengketa proses akibat dikeluarkannya SK/BA

KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sehingga diperlukan pengawasan dan pencegahan yang maksimal setiap tahapan, tutupnya”.

Hal senada juga disampaikan Hari Dermanto, SH., MH (Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalimantan Timur) dalam paparannya menyampaikan hal yang penting mengenai aspek bagaimana proses pencegahan terjadinya pelanggaran sengketa diatur ada Perbawaslu khusus untuk mengatur itu. Penting untuk membangun koordinasi, kerjasama antarlembaga, sosialisasi dan kegiatan lain itu terhubung dengan pihak-pihak yang punya kepentingan dengan sengketa agar kualitas penyelesaian sengketa baik dan dapat membantu dalam membuat suatu keputusan, pungkasnya.

Dalam akhir kegiatan ditambahkan oleh Ibu Dr. Rudyanti Dorotea Tobing, SH., M.Hum atau Ibu Anti sapaan akrabnya bahwa “ Tetaplah megedepankan keadilan dalam penyelesaian sengketa, karena hukum itu sejatinya adalah keadilan”.

- **Bawaslu Katingan Gelar Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas**



Gambar 17. Screenshot Berita Kegiatan Bawaslu Katingan Gelar Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas bersama anak-anak penyandang disabilitas dan pendamping dari Sekolah Luar Biasa (SLB) Kabupaten Katingan, Dinas Sosial Kabupaten Katingan, dan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan (02/06/2022).

Kegiatan ini dihadiri dan dibuka oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM. Dalam kegiatan ini juga turut hadir Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Widiyanto, BA, Kepala Bagian Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Jimmy Anwar, S.STP., M.Si, Anggota KPU Kabupaten Katingan M. Al-Kustari, S.Pd.I, serta Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia kawung, SH., MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa upaya kami dalam menjaga keadilan pemilu bagi kaum disabilitas khususnya di Kabupaten Katingan, diharapkan agar hak pilih yang memiliki keterbatasan fisik tetap tersalurkan saat pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang agar terwujudnya pemilu dan pilkada yang jujur, adil, bermartabat, berkualitas dan berintegritas.

Dilanjutkan Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bambang Widiyanto, BA mengapresiasi atas diadakannya kegiatan ini. Menurutnya Selain bisa bersilaturahmi, perwakilan kelompok disabilitas bisa mengetahui hak-haknya sebagai warga negara itu sama dengan masyarakat pada umumnya. Hak suara yang sama dalam menentukan pilihan, menentukan pemimpin kedepan, ujar beliau.

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah serta narasumber kegiatan Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM, memotivasi peserta disabilitas bahwa meskipun disabilitas, jasmaninya terbatas namun suara kita sama satu. “Saya sangat mendukung dan memperjuangkan penyandang disabilitas dalam menentukan hak pilihnya, dan saya berharap di pemilu dan pilkada mendatang, fasilitas dan akses disabilitas akan lebih ramah lagi terhadap kaum disabilitas, pungkasnya”.

Sementara Anggota KPU Kabupaten Katingan M. Al-Kustari, S.Pd.I, selaku Narasumber kegiatan menjelaskan terkait data pemilih, hak pemilih serta tahapan Pemilu yang akan dilakukan pada tahun 2024.

Sosialisasi ini diadakan dalam upaya mengawal dan menjaga keadilan pemilu diseluruh lapisan masyarakat tidak terkecuali kelompok disabilitas dengan ragam disabilitasnya.

- **Perkuat sinergitas, Bawaslu Katingan audiensi dengan Pengadilan Negeri Kasongan**



Gambar 18. Screenshot Berita Kegiatan Perkuat sinergitas, Bawaslu Katingan audiensi dengan Pengadilan Negeri Kasongan

Bawaslu Kabupaten Katingan - Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH dan Anggota Bawaslu Katingan, Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd., dan Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd didampingi Kepala Sekretariat Irwanto, S.Si beserta staf Humas, melakukan audiensi ke Pengadilan Negeri Kasongan.

Pihak dari Pengadilan Negeri Kasongan menyambut baik langkah yang telah diambil oleh Bawaslu Kabupaten Katingan untuk melakukan audiensi.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Kepala Pengadilan Negeri Kasongan Sri Rejeki Marsinta, SH., M.Hum beserta Hakim dan Juru Bicara dari Pengadilan Negeri Kasongan, bertempat di ruang pertemuan Pengadilan Negeri Kasongan.

Yos sapaan akrabnya menyampaikan maksud dan tujuan audiensi yaitu dalam rangka silaturahmi sekaligus membangun sinergitas dalam rangka persiapan menghadapi Pemilu/Pemilihan Serentak tahun 2024 mendatang.

Harapan khusus disampaikan Cesar Antonio Munthe, SH., MH juru bicara Pengadilan Negeri Kasongan mengatakan kunjungan ini merupakan suatu langkah baik untuk membangun tali silaturahmi khususnya dalam rangka menegakkan hukum dilingkungan Kabupaten Katingan. Juga dalam rangka Pemilu tahun 2024 nanti, semoga segala persiapan dan lain-lain Bawaslu tetap bersinergi dengan baik juga dengan aparat penegak hukum lainnya sehingga tercipta suatu keharmonisan dan penegakkan hukum di Indonesia bisa terselenggara dengan baik.

Sebagai penutup audiensi, Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan foto Bersama dengan Pihak Pengadilan Negeri Kasongan.

- **Tingkatkan Data Pemilih yang Valid dan Akurat, Bawaslu lakukan Audiensi dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan**



Gambar 19. Screenshot Berita Kegiatan Tingkatkan Data Pemilih yang Valid dan Akurat, Bawaslu lakukan Audiensi dengan Lapas Narkotika Kelas IIA Kasongan

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan – Dalam rangka meningkatkan persiapan Data Pemilih Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu lakukan Audiensi dengan Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan.

Audiensi diterima langsung oleh Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan Ahmad Hardi, Bc. IP, SH., MM bertempat di ruangannya. Turut hadir langsung Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH dan Anggota Bawaslu Katingan, Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd., dan Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd didampingi Kepala Sekretariat Irwanto, S.Si beserta staf Humas.

Dalam audiensi ini bertujuan untuk bersinergi dengan Lapas Narkotika Kasongan guna memperoleh data yang valid, akurat, dan komprehensif untuk Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ahmad Hardi, Bc. IP, SH., MM Kepala Lapas Narkotika Kelas II A Kasongan berharap Pelaksanaan Pemilihan nanti khususnya dilapas narkotika Kasongan berjalan dengan baik dan lancar. Segala hal yang berkaitan dengan sinergitas dalam pelaksanaannya tinggal bagaimana Bawaslu menginformasikan, akan kami berikan pelayanan yang maksimal dan data-data yang akan diminta nanti tentunya akan dipenuhi sepanjang data-datanya lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pungkas beliau.

Kedatangan audiensi ini sangat diapresiasi oleh Pihak Lapas Narkotika Kasongan, selain silaturahmi ini juga sebagai bentuk kerja sama dalam mensukseskan Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang.

- **Sukseskan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Katingan**



Gambar 20. Screenshot Berita Kegiatan Sukseskan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu bersinergi dengan Kejaksaan Negeri Katingan

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan – Menghadapi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Katingan lakukan audiensi dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Katingan. Kegiatan tersebut bertempat di Ruang Kepala Kejaksaan Negeri Katingan.

Pada kesempatan itu, Jajaran Pimpinan Bawaslu Kabupaten Katingan bertemu langsung dengan Kejaksaan Negeri (Kajari) Katingan Tandy Mualim, SH, dan beliau menerima kunjungan audiensi dengan baik terkait pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilu serentak 2024 mendatang.

Kedatangan Bawaslu Kabupaten Katingan ini dalam rangka Audiensi serta menjalin silaturahmi dengan pihak Kejaksaan juga melakukan koordinasi dalam rangka kesiapan dalam tugas-tugas penegakkan hukum tindak pidana pemilu pada Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024 mendatang. Khususnya dukungan membangun sinergi antar lembaga yang masuk dalam Sentra Gakkumdu.

Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd berharap kedepan lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu dapat saling bersinergi dalam menghadapi tantangan pelaksana Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 mendatang. Penguatan dan persamaan persepsi dapat dilakukan melalui koordinasi, peningkatan kapasitas SDM antar lembaga, dan menjalin komunikasi yang baik antara instansi penegak hukum pemilu. Sehingga sinergitas Sentra Gakkumdu sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan harapan penanganan tindak pidana pemilu ini dapat secara efektif dijalankan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Ditambahkan, dalam pertemuan tersebut Kajari Katingan siap mendukung dan bersinergi dengan Bawaslu untuk mensukseskan

pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilu serentak 2024. Beliau juga menambahkan dengan adanya kedatangan dari Bawaslu mudah-mudahan Pemilu yang akan datang nanti dapat berjalan dengan jujur dan adil sebagaimana yang ditetapkan.

- **Bawaslu Katingan Audiensi Dengan Sekda Kabupaten Katingan**



Gambar 21. Screenshot Berita Kegiatan Bawaslu Katingan Audiensi Dengan Sekda Kabupaten Katingan

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan - Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan didampingi Staf melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan (Senin, 04/07/2022) di Kantor Sekda Pemerintah Kabupaten Katingan. Dalam audiensi tersebut, Pimpinan Bawaslu Kabupaten Katingan ditemui langsung oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan Pransang, S.Sos., M.A.P.

Ketua Bawaslu Kabupaten Yosafat Erictovia Kawung, SH., MH menyampaikan terimakasih dan menjelaskan maksud tujuan dari audiensi yakni menjalin koordinasi antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah mengingat tahun 2024 kita akan melaksanakan Pemilu dan Pilkada secara

serentak. Sebagai mitra Bawaslu, Pemerintah Daerah juga memiliki peranan penting untuk mendukung suksesnya Pemilu dan Pilkada.

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan menyambut dengan baik audiensi yang dilakukan oleh Bawaslu dan beliau juga akan mendukung dan berharap jalinan serta sinergitas antara pemerintah dan Bawaslu dapat terus terjalin dengan baik sesuai dengan tugas dan pokok fungsinya masing-masing.

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Katingan mendukung program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk persiapan Pemilu/Pemilihan tahun 2024, juga terkait anggaran yang sudah diusulkan akan kami kaji kembali sesuai dengan mekanisme yang ada, pungkas Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.

- **Wujudkan Pemilu 2024 Berkualitas, Bawaslu Katingan Audiensi dengan Kapolres Katingan**



Gambar 22. Screenshot Berita Kegiatan Wujudkan Pemilu 2024 Berkualitas, Bawaslu Katingan Audiensi dengan Kapolres Katingan

Kasongan - Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan audiensi dengan Kapolres Katingan AKBP P. Sonny Bhakti W., S.H., S.I.K., M.I.K. Senin (04/07/2022). Ketua Bawaslu Yosafat Erictovia Kawung, SH., MH beserta Anggota Bawaslu dan Koordinator Sekretariat disambut langsung oleh Kapolres.

Audiensi bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergisitas dan harmonisasi antara Bawaslu dan Polres Katingan dalam mewujudkan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 yang berkualitas dan akuntabel. Yos menyampaikan “Tugas pengawasan Pemilu secara undang-undang berada pada Bawaslu akan tetapi untuk meningkatkan partisipasi pengawasan Pemilu, Bawaslu dapat melibatkan elemen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait untuk dapat membantu tugas-tugas pengawasan Pemilu”.

Kapolres Katingan AKBP P. Sonny Bhakti menegaskan “Kepolisian akan bertugas melakukan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan pemilu, agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar”.

Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd juga mengatakan “Tahapan Pemilu/Pemilihan 2024 tentunya menguras tenaga dan pikiran, kami minta dukungan dan pengamanan ekstra ketat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh aparat kepolisian untuk memantau pelaksanaan pemilu mendatang”.

- **Perkuat Sinergitas Lembaga, Bawaslu Katingan Audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Katingan**



Gambar 23. Screenshot Berita Kegiatan Perkuat Sinergitas Lembaga, Bawaslu Katingan Audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Katingan

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan - Serius tapi santai, begitulah kesan kegiatan Audiensi Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Katingan bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan, yang berlangsung di ruang rapat gabungan Komisi I DPRD, Selasa (05/07/2022).

Dalam pertemuan audiensi diterima langsung dengan baik oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan, Marwan Susanto, S.Sos., M.AP beserta Nanang selaku Wakil Ketua, Toni Yosepta selaku Ketua Komisi 1, serta Gimmak Bulingga, Wiwik dan Dahlia selaku Anggota Komisi I.

Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH menyampaikan dan melaporkan beberapa hal yaitu terkait kegiatan pemilu tahun 2019 dan Pilgub tahun 2020 dalam keadaan kondusif untuk Kabupaten Katingan. Kemudian beliau juga

menyampaikan Bawaslu siap melaksanakan tugas-tugas pengawasan, dan juga sudah melakukan audiensi dengan stake holder di Kabupaten Katingan.

Selain itu juga Yos sapaan akrabnya menyampaikan bahwa Bawaslu Katingan telah mendapatkan pinjam pakai Gedung Transito dari Dinas Sosial. Dalam hal ini beliau juga menyampaikan pendanaan pemilu dari APBN dan meminta dukungan atas anggaran.

“Kami ucapkan terima kasih dan apa yang sudah disampaikan ke DPRD khususnya Komisi I akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah. Harapan kita apa yang menjadi kebutuhan Bawaslu Katingan terkait proses Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 nanti bisa terakomodir semua, sehingga Pemilu/Pemilihan tahun 2024 nanti bisa terlaksana dengan baik, ungkap Marwan.

Disisi lain Ketua Komisi 1 menambahkan bahwa Bawaslu Katingan telah mendapatkan pinjam pakai Gedung dan telah bermohon untuk sarana dan prasarana, serta memetakan kerawanan pada Pemilu.

“Apresiasi atas kondisi Pemilu dan Pemilihan yang relatif kondusif untuk perekrutan Ad-Hoc serta ranah yang rawan pendaftaran dan penetapan dipaparkan”, tambah Gimmak (Anggota Komisi I).

Adapun kegiatan audiensi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Katingan tersebut turut diikuti oleh Pimpinan Bawaslu, yakni Wahyuni S.Pd.I., M.Pd (Anggota), Anita Fransiska, S.Pd., M.Pd (Anggota), Irwanto S.Si (Koordinator Sekretariat) bersama 2 staf sekretariat.

- **Dimulai 1 hingga 14 Agustus, Bawaslu Awasi Masa Pendaftaran Parpol 24 Jam**



Gambar 24. Screenshot Berita Kegiatan Dimulai 1 hingga 14 Agustus, Bawaslu Awasi Masa Pendaftaran Parpol 24 Jam

Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum- Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para pengawas pemilu di seluruh Indonesia untuk memperhatikan serta mengawasi dengan seksama tahapan pendaftaran partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024. Dalam Peraturan KPU (PKPU) 4/2022 tahapan pendaftaran parpol dilakukan pada 1-14 Agustus 2022, untuk itu Bagja meminta para pengawas pemilu bersiaga 24 jam mengawasi pendaftaran.

Pada tahapan pendaftaran ini, parpol akan mendaftar serta melampirkan berkas-berkas persyaratan ke akun Sistem Informasi Parpol (Sipol). Bagja mengatakan nantinya para Ketua Bawaslu di setiap tingkatan akan memperoleh akses Sipol yang sebelumnya telah diberikan oleh KPU.

"Bawaslu Provinsi dan kabupaten/kota khususnya ketua akan diberikan akses akun Sipol dengan catatan ada kontrak perjanjian kerahasiaan antara ketua Bawaslu RI dengan ketua Bawaslu provinsi serta ketua Bawaslu Kabupaten/Kota," cetus Bagja dalam rapat daring

Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Sabtu (30/7/2022).

Dia menegaskan perjanjian kerahasiaan tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Bawaslu. Para pengawas pemilu yang bertugas mengawasi input Sipol juga tidak diberikan kewenangan untuk memotret atau mengambil data.

"Pada saat nanti memperhatikan Sipol berjalan, teman-teman wajib memperhatikan, mengamati data yang dimasukkan ke sipol dengan cattan tidak boleh memotret untuk kepentingan pribadi. Bawaslu harus menjaga kerahasiaan seperti NIK dan data keanggotaan parpol, tidak ada kewenangan untuk hal tersebut," papar Bagja.

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda berharap para pengawas pemilu di semua tingkatan untuk menjaga soliditasnya masing-masing. Menurutnya, tahapan pendaftaran parpol merupakan elemen penting dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Dia memandang eksistensi dari parpol penting dari sisi hukum ketatanegaraan. Para parpol yang nantinya mendaftar merupakan elemen yang akan terlibat dalam pross pemilu dan nanti mereka akan masuk dalam legislatif dan pemerintahan.

"Maka kita harus meningkatkan SDM kita sambil membaca ketentuan PKPU 4/2022 sambil memetakan potensi pelanggarannya," kata Herwyn.

Selanjutnya dalam rapat daring pengawasan pendaftaran parpol tersebut, para peserta yang dihadiri 34 pimpinan Bawaslu Provinsi serta 514 Bawaslu Kabupaten diberikan bimbingan teknis pemakaian akun sipol. Dalam forum tersebut juga dilakukan simulasi penggunaan sipol.

Sumber : repost bawaslu.go.id

- **Lolly : Masyarakat Harus Teredukasi Soal Pengawasan Lewat Kerja Kehumasan**



Gambar 25. Screenshot Berita Kegiatan Lolly : Masyarakat Harus Teredukasi Soal Pengawasan Lewat Kerja Kehumasan

Palangka Raya, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Dalam rangka memberikan informasi terkait pengawasan Pemilu 2024, Anggota Bawaslu Lolly Suheny meminta agar kehumasan Bawaslu hingga tingkat Kabupaten/Kota dapat menyampaikan informasi yang akurat dan tidak liar.

Sehingga dirinya meminta seluruh divisi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota dapat berperan maksimal melalui kerja-kerja kehumasan. Dalam ranah publikasi dan pemberitaan, Lolly menekankan perlu memperkuat edukasi tidak hanya kegiatan semata.

”Jadi target kita terjadinya edukasi soal pengawasan pemilu kepada publik melalui kerja kehumasan,” ungkapnya dalam Rapat Evaluasi Kehumasan Meliputi Peliputan dan Dokumentasi Bagi Bawaslu Kabupaten Kota se-Kalimantan Tengah, Selasa (9/8/2022) siang.

Lolly menjelaskan mengenai konteks edukasi yang dimaksud adalah arah kebijakan lima tahun kedepan dengan inovasi-inovasi yang segar, melalui media yang tersedia pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.

“Kita harus paham terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan untuk memberikan edukasi kepada publik, dengan terus memperbaharui informasi,” ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu tersebut.

Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi menambahkan, dengan beberapa perbaikan terkait kehumasan jajaran Kabupaten Kota mampu meningkatkan kehumasan dengan semangat kerja pengawasan. “Semangat kerja yang dibarengi dengan publikasi kepada publik,” terangnya.

Sebagai informasi kegiatan yang dihadiri peserta Koordinator Divisi yang membidangi kehumasan dari 13 Kabupaten dan 1 Kota beserta staf kehumasan juga dihadiri Ketua, Jajaran Anggota, Kasek dan Pejabat Struktural Bawaslu Kalteng serta Narasumber dari Sekretariat Daerah Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kalimantan Tengah dan dari PT. Intim Media Perkasa.

Penulis : Danny (Humas Bawaslu Kalteng)

Editor: Reyn Gloria

Sumber : [Repost kalteng.bawaslu.go.id](https://kalteng.bawaslu.go.id)

- **MENGANGKAT TEMA : MERAWAT DEMOKRASI DENGAN MELAWAN POLITIK IDENTITAS DAN MENJAGA NETRALITAS ASN, BAWASLU KATINGAN LAKSANAKAN SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF TAHUN 2022**



Gambar 26. Screenshot Berita Kegiatan Mengangkat Tema : Merawat Demokrasi Dengan Melawan Politik Identitas Dan Menjaga Netralitas Asn, Bawaslu Katingan Laksanakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan menggelar Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022 dengan mengangkat Tema : “Merawat Demokrasi Dengan Melawan Politik Identitas dan Menjaga Netralitas ASN” di Nowela Café (Jumat, 12 Agustus 2022).

Sosialisasi ini diikuti oleh Peserta dari Perwakilan Forkopimda dan Tokoh Agama Kabupaten Katingan.

Kegiatan ini juga dihadiri dan dibuka langsung oleh Bupati Katingan Sakariyas, SE. Pembukaan Kegiatan ini diisi dengan sambutan oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan Irwanto, S.Si, Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH, dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.

Dalam Sambutannya Bupati Katingan mendukung kegiatan sosialisasi ini dan mengucapkan terimakasih atas terlaksananya kegiatan ini serta menghimbau agar Netralitas ASN saat Pemilu mendatang dengan tidak turut terlibat dalam politik. Saya berterimakasih kepada Bawaslu yang telah merawat demokrasi dengan melawan politik identitas dan menjaga netralitas ASN khususnya di Katingan ini, ” ungkap Sakariyas. Beliau juga menambahkan perlu adanya keseimbangan antara Bawaslu, KPU dan Pemerintah Daerah agar Pemilu 2024 kedepan terlaksana dengan baik tentunya dengan komunikasi yang baik pula.

Selanjutnya dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, beliau menyampaikan mengapa kegiatan kali ini mengangkat Tema : Merawat Demokrasi dengan Melawan Politik Identitas dan Menjaga Netralitas ASN, Karena berangkat dari pemilu-pemilu sebelumnya, bahwa secara nasional isu politik identitas sangat masiv dan dianggap senjata paling ampuh untuk menjatuhkan rival

politik. Begitupula halnya mengenai Netralitas ASN, meski secara nasional trennya meningkat, tapi tidak demikian untuk Kabupaten Katingan, akan tetapi walaupun kondisinya demikian, tetap penting bagi kita untuk terus mewaspadainya. Dalam sambutannya, Ia menegaskan bahwa ASN jangan salah kaprah dengan ketatnya aturan mengenai netralitas ASN, aturan tersebut tidak menghilangkan hak konstitusi ASN sebagai warga negara yang tetap memiliki hak untuk dipilih dan memilih serta diberikan hak untuk mengetahui visi misi, program dan mengenal sosok calon pemimpinnya, hanya saja pelaksanaan hak-hak tersebut harus dilaksanakan sesuai rambu-rambu yang telah diatur. Dan perlu diketahui bahwa, Bawaslu dalam hal ini hanya melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana amanat UU 7 tahun 2017. Tutupnya.

Hj. Siti Wahidah, S.Ag., MM juga menyampaikan dalam sambutannya menghimbau untuk masyarakat ikut berkontribusi melakukan Pengawasan mandiri agar dapat melaksanakan Demokrasi yang lebih baik kualitasnya kedepan, dan mari bersama-sama melalui Tahapan Pemilu Serentak 2024.

Selain itu Narasumber yang menyampaikan materi adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang, S.Sos, M.A.P, Ketua FKUB Kabupaten Katingan Edy Rahmad Sosiawan dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Hj. Siti Wahidah, S.Ag., M.M.

Kegiatan ini diharapkan menjadi perpanjangan lidah Bawaslu menyampaikan untuk masyarakat tentang politik identitas yang seperti apa yang dilarang, serta memberikan pendidikan edukasi yang baik kepada masyarakat.

- **PENGUMUMAN JADWAL PEMBENTUKAN PANWASCAM TAHUN 2022**



Gambar 27. Screenshot Berita Kegiatan Pengumuman Jadwal Pembentukan Panwascam Tahun 2022

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 silahkan [KLIK DISINI](#) !!!

- **BAWASLU KATINGAN REKRUT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN (PANWASLUCAM) SE-KABUPATEN KATINGAN**



Gambar 28. Screenshot Berita Kegiatan Bawaslu Katingan Rekrut Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) Se-Kabupaten Katingan

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan - Mengawal Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Katingan terus melakukan berbagai persiapan, diantaranya merekrut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan.

"Sesuai Keputusan Bawaslu RI Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tanggal 09 September 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024", kami akan melakukan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang tahapan pengumuman pendaftarannya dimulai sejak tanggal 15 sampai 21 September 2022 dan tahapan penerimaan berkas pendaftaran dimulai sejak tanggal 21 sampai 27 September 2022. Setiap Kecamatan dibutuhkan 3 orang Panwaslu Kecamatan, jadi untuk Kabupaten Katingan,

total yang dibutuhkan adalah 39 orang," ucap Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Beliau mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Katingan yang ingin berpartisipasi mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 untuk mendaftarkan diri di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan yang beralamat di Jl. Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama. Sesuai juknis Bawaslu RI bahwa Panwaslu Kecamatan harus sudah terbentuk dan dilantik pada tanggal 26 – 28 Oktober 2022 mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung, SH., MH juga menambahkan untuk pengambilan formulir pendaftaran atau untuk melihat persyaratan bisa langsung datang ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan atau bisa juga kunjungi laman Website Bawaslu Katingan, atau juga bisa melihat official Account Media Sosial Bawaslu Katingan (FB, IG dan Twitter)", tambahnya.

Adapun tugas dan wewenang Panwaslu Kecamatan diantaranya adalah mengawasi seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kecamatan masing-masing seperti pemuktahiran daftar pemilih, penetapan daftar pemilih, pelaksanaan kampanye, pungut hitung suara hasil Pemilu di TPS, pendistribusian logistik dan pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK, tutupnya.

Sehingga Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Katingan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, atas kewenangan yang

diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Persyaratan dan Formulirnya silahkan [DOWNLOAD DISINI](#) !!!

- **BAWASLU KATINGAN UMUMKAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN KATINGAN**



Gambar 29. Screenshot Berita Kegiatan Bawaslu Katingan Umumkan Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan Telah melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslucam) se-Kabupaten Katingan dari 121 orang yang mendaftar, 118 pendaftar yang lolos seleksi administrasi, Selasa(11/09/2022).

Nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus Seleksi Administrasi wajib mengikuti seleksi Tes Tertulis (CAT). Kemudian setelah lolos Tes Tertulis nanti akan mengikuti Tes Wawancara. Jika tidak mengikuti Tes Tertulis maka peserta tidak berhak mengikuti tes Wawancara.

Pengumuman hasil seleksi Administrasi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan telah diunggah melalui website serta akun-akun sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram dan Twitter Bawaslu Kabupaten Katingan.

Ketua Pokja Wahyuni, S.Pd.I., M.Pd mengatakan, yang lolos dalam penelitian berkas administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan adalah peserta yang sudah memenuhi syarat dalam persyaratan yang sudah ditentukan. Dan untuk yang tidak lolos adalah peserta yang tidak memenuhi syarat karena belum berusia 25 tahun. Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi panwaslu kecamatan sudah diunggah melalui website dan sosial media Bawaslu Kabupaten Katingan sehingga masyarakat dapat mengakses informasi pengumuman tersebut dengan mudah, tutupnya.

Setelah pengumuman seleksi administrasi, nantinya peserta akan melaksanakan ujian tertulis berbasis tes socrative dan tes wawancara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Katingan Jl. MT Haryono (Komplek Perkantoran) Kereng Humbang.

Tes tertulis Calon Anggota Panwaslu kecamatan akan dimulai pada tanggal 16 Oktober 2022 dan tes wawancara akan dimulai dari Hari Selasa, 18 s.d 19 Oktober 2022. Tes tertulis dan wawancara akan dibagi dalam beberapa sesi.

Diharapkan peserta yang lulus seleksi administrasi membaca pengumuman dengan cermat dan dapat hadir sesuai dengan jadwal tahapan selanjutnya yang telah ditentukan.

Setelah adanya pengumuman lulus administrasi, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap hasil seleksi administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh pada file dibawah ini, kemudian disampaikan kepada Tim Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Katingan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan Jl. Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama mulai tanggal 12 Oktober s.d 18 Oktober 2022.

[\(FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT\)](#)

- **PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN BERKAS ADMINISTRASI CALON PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN KATINGAN**



Gambar 30. Screenshot Berita Kegiatan Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, berikut ini nama-nama Calon Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Katingan yang lulus Seleksi Administrasi sebagai berikut :

[\(SILAHKAN DOWNLOAD DISINI\)](#)

- **PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS(ONLINE) CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN KATINGAN**



Gambar 31. Screenshot Berita Kegiatan Pengumuman Hasil Tes Tertulis(Online) Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan, Pada hari ini (18/10/2022) adalah Jadwal Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Setelah melakukan seleksi administrasi calon anggota Panwaslu Kecamatan, berikut ini nama-nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi tes tertulis sebagai berikut :

Nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang lulus seleksi tes tertulis [\(Dapat dilihat di sini\)](#)

Nama calon anggota Panwaslu Kecamatan yang dinyatakan lulus seleksi tes tertulis wajib mengikuti seleksi Tes Wawancara. Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Katingan telah diunggah melalui website serta akun-akun sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram dan Twitter Bawaslu Kabupaten Katingan.

Tes Tertulis Online Calon Anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Katingan sudah dilaksanakan di Aula BKPSDM Kabupaten Katingan Pukul 08-00 WIB s/d 14.30 WIB sesuai dengan pembagian sesinya. Pelaksanaan Tes Tertulis Online berjumlah 118 peserta dengan catatan 40 peserta yang tidak hadir (L=31, P=9), jadi total Peserta yang hadir berjumlah 78 orang.

Setelah pengumuman Hasil Tes Tertulis, nantinya peserta akan melaksanakan tes wawancara di Ruang Rapat Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kab. Katingan Jl. MT Haryono (Komplek Perkantoran) Kereng Humbang.

Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu kecamatan akan dimulai pada tanggal 19-20 Oktober 2022, dan tes wawancara nanti akan dibagi dalam beberapa sesi. Diharapkan peserta yang lolos Tes Tertulis

membaca pengumuman dengan cermat dan dapat hadir sesuai dengan jadwal tahapan selanjutnya yang telah ditentukan.

Setelah adanya pengumuman hasil tes tertulis, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dengan cara mengisi formulir yang dapat diunduh pada website <https://katingan.bawaslu.go.id/> dan bisa juga download file dibawah ini, kemudian disampaikan kepada Tim Pokja Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Katingan di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Katingan Jl. Soetoyo S Kereng Humbang Kasongan Lama mulai tanggal 12 Oktober s.d 18 Oktober 2022.

[\(FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT\)](#)

- **PENGUMUMAN PANWASLU KECAMATAN TERPILIH SE-KABUPATEN KATINGAN**



Gambar 32. Screenshot Berita Kegiatan Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih Se-Kabupaten Katingan

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan, Pada hari ini (26/10/2022) adalah Jadwal Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019. Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten Katingan melakukan rapat pleno penetapan nama-nama Panwaslu Kecamatan terpilih pada tanggal 24 bulan Oktober tahun 2022 pukul 08.00 WIB maka Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Katingan hari ini tanggal 26 Oktober tahun 2022 Secara resmi mengumumkan nama-nama Panwaslu Kecamatan Terpilih ([Dapat dilihat di sini](#))

Panwaslu Kecamatan Terpilih dinilai berdasarkan Penggabungan Nilai 40% Nilai Tes Tertulis dan 60% Nilai Tes Wawancara. Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Katingan telah diunggah melalui website serta akun-akun sosial media lainnya seperti Facebook, Instagram dan Twitter Bawaslu Kabupaten Katingan.

Panwaslu Kecamatan yang Terpilih akan mengikuti Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kabupaten Katingan dilaksanakan pada Hari / Tanggal : Sabtu, 29 Oktober 2022, Pukul : 09.00 WIB – Selesai.

Catatan Menggunakan Pakaian :- Laki-laki : Atasan berwarna putih, bawahan celana hitam menggunakan jas, dasi dan peci, serta bersepatu dan - Perempuan : Kebaya Nasional.

Bagi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan yang terpilih, wajib melengkapi persyaratan antara lain :
*Surat Keterangan Rohani/Kejiwaan dan Bebas Dari Penyalahgunaan

Narkotika dari Rumah Sakit Pemerintah, yang dapat disampaikan paling lambat 28 Oktober 2022 (sebelum pelantikan).

Selamat untuk Panwaslu Kecamatan yang Terpilih se-Kabupaten Katingan, semangat untuk mengawasi Demokrasi Pemilu Serentak 2024.

- **BAWASLU KATINGAN RESMI LANTIK ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN KATINGAN**



Gambar 33. Screenshot Berita Kegiatan Bawaslu Katingan Resmi Lantik Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Katingan

Kasongan, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Katingan Yosafat E. Kawung, SH.,MH resmi melantik anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) sebanyak 37 Panwaslu Kecamatan (Laki" berjumlah 25 Orang dan Perempuan berjumlah 12 Orang) dari 13 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Katingan, Minggu (29/11/2022).

Dalam sambutannya, Yos (sapaan akrab) menyampaikan bahwa Panwaslu Kecamatan yang telah dilantik segera menyesuaikan diri dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan segera membangun koordinasi dengan para stakeholder di wilayah kerjanya masing-masing, disamping itu, ia juga berpesan kepada anggota Panwaslu Kecamatan agar mampu menjalankan amanah yang telah diberikan dan mengimplementasikan tugas pengawasan demi suksesnya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Katingan.

“kami (Bawaslu) berharap rekan-rekan Panwaslu Kecamatan yang telah terpilih mampu amanah dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, dan tentunya terus menjaga sinergitas demi suksesnya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 mendatang,” ungkapnya.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Katingan juga menyerukan perang terhadap politik uang. Menurutnya, politik uang merupakan musuh bersama sebab juga menysar kepada penyelenggara. "Politik uang menjadi musuh bersama, sebab tidak hanya menysar masyarakat saja tetapi juga penyelenggara," pungkasnya.

Turut hadir dalam acara Pelantikan yaitu :

- Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Dr.Rudyanti Dorotea Tobing, SH., M.Hum
- Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Pransang, S.Sos., M.AP
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Katingan
- Kalapas Narkotika Kelas II A Kasongan
- Ketua KPU Kabupaten Katingan
- Perwakilan Camat Se-Kabupaten Katingan dan
- Perwakilan Partai Politik Se-Kabupaten Katingan

- **Meminimalisir Pelanggaran, Bawaslu Kalteng Resmikan Kampung Pengawasan Partisipatif**



Gambar 34. Screenshot Berita Kegiatan Meminimalisir Pelanggaran, Bawaslu Kalteng Resmikan Kampung Pengawasan Partisipatif

Kasongan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah—Anggota Bawaslu Kalteng Siti Wahidah mengatakan untuk dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran pemilu, jajaran pengawas memerlukan peran serta berbagai unsur masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

“Terbatasnya jumlah personil yang dimiliki jajaran pengawas dan kondisi geografis Kalimantan Tengah yang cukup sulit, maka diperlukan dukungan masyarakat dalam kerangka masyarakat melek mengawasi karena sejatinya pemilu adalah milik rakyat, sehingga mari bersama-sama kita menjaga dan mengawal proses demokrasi di Indonesia menjadi semakin baik,” ungkapnya saat meresmikan Kampung Pengawasan di Desa Banut Kalanaman, Rabu (23/11/2022).

Pada kesempatan yang sama Yosafat Ketua Bawaslu Katingan dalam sambutannya mengatakan bahwa kampung pengawasan lahir dari

keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

“Tidak hanya melalui kampung pengawasan ini saja masyarakat dapat terlibat langsung dalam pengawasan, karena mulai dari Bawaslu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga tingkat panitia pengawas pemilu *ad-hoc* membuka diri seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bermitra dalam pengawasan pemilu,” terang pria yang senang menggunakan peci hitam ini.

Sebagai informasi, kampung pengawasan di Kabupaten Katingan diresmikan oleh Anggota Bawaslu Kalteng Siti Wahidah dan dihadiri oleh 40 orang tamu undangan yaitu internal Bawaslu, Camat Katingan Hilir, Babinkamtibmas, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh adat dan masyarakat yang berasal desa Tumbang Liting, Tewang Kadamba serta Banut Kalanaman tempat acara berlangsung.

Sumber : *Repost Humas Bawaslu Kalteng*

BAB IV

PELAKSANAAN FUNGSI KEHUMASAN

A. Pengelolaan Hubungan Masyarakat

Pada tahapan Pemilihan Umum 2024, Bawaslu Kabupaten Katingan mengajak seluruh jajaran masyarakat maupun Organisasi Masyarakat (Ormas) agar berperan aktif dalam mengawasi jalannya Tahapan Pemilu serta melaporkan jika adanya dugaan Pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Katingan juga menghimbau agar seluruh lapisan Masyarakat untuk bersikap Netral dan menjunjung tinggi Integritas agar terciptanya Pemilu yang berasaskan LUBER JURDIL.

B. Pengelolaan Hubungan dengan Media

Guna membangun citra lembaga, Bawaslu Kabupaten Katingan senantiasa menjalin hubungan baik dengan media massa sebagai salah satu mitra kerjanya. Bentuk hubungan dengan media massa dilaksanakan dengan menghubungi pihak penerbit media serta memberi apresiasi atas beberapa berita terkait Kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Katingan, serta menunjuk *contact person* yang dapat dihubungi oleh media massa dan meminta media massa menunjuk *contact person* (wartawan) yang menjadi penghubung antara Bawaslu Kabupaten Katingan dengan wartawan atau media massa. Berikut pemberitaan kegiatan Bawaslu Kabupaten Katingan di media massa :



Gambar 35. Screenshot Berita Kegiatan diKalteng Ekspres



Gambar 36. Screenshot Berita Kegiatan diKalteng.co

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bawaslu Kabupaten Katingan bagian Divisi Humas dalam implementasi keterbukaan informasi publik terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat agar keterbukaan informasi di Bawaslu Kabupaten Katingan dapat diwujudkan. Kami juga berupaya untuk selalu memnerikan informasi yang terbuka kepada pemohon informasi atau kepada masyarakat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga menyadari banyak masih kekurangan dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan, dan berharap kedepannya lebih baik.

Fokus dan sasaran humas Bawaslu Kabupaten Katingan bukan hanya terbatas pada masyarakat luas, tetapi juga praktisi jurnalistik di media massa. Hal ini mengingat semakin derasnya arus informasi yang memenuhi ruang-ruang publik kita. Akibatnya informasi yang diterima masyarakat menjadi semakin banyak dan beragam. Hal ini membuka peluang terjadinya kerancuan informasi. Disinilah pentingnya menjalin hubungan dengan pers. Sehingga kualitas informasi yang bersumber dari luar Bawaslu Kabupaten Katingan dapat disampaikan secara akurat, tepat dan dengan pemahaman yang benar.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, humas Bawaslu Kabupaten Katingan perlu mengevaluasi hasil kerjanya kepada public sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satunya dengan menyusun laporan kehumasan. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengenal profil dan program yang dijalankan unit kehumasan di Bawaslu Kabupaten Katingan sekaligus agar memperoleh respon masyarakat yang berguna untuk perbaikan kedepannya.

B. REKOMENDASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, humas Bawaslu Kabupaten Katingan perlu mengevaluasi hasil kerjanya kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban. Salah satunya dengan menyusun laporan kehumasan. Hal ini bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengenal profil dan program yang dijalankan unit kehumasan di Bawaslu Kabupaten Katingan. Sekaligus memperoleh respon masyarakat yang berguna untuk perbaikan kedepannya. Kami menyadari, kepercayaan masyarakat dapat tumbuh melalui kedekatan yang terus dibangun. Untuk itu, humas Bawaslu Kabupaten Katingan terus mengupayakan perbaikan kinerjanya. Beberapa rekomendasi dalam upaya meningkatkan kinerja Humas Bawaslu Katingan untuk membentuk opini publik dengan menyampaikan informasi terukur, membangun komunikasi efektif yang juga menerima informasi dari masyarakat sekaligus mencerna opini masyarakat.

Selain itu, kedepan humas harus berevolusi dalam artian lebih aktif menyajikan informasi yang bermanfaat bagi publik, dan pemanfaatan teknologi dalam penyebaran informasi. Terkhusus dalam pelayanan PPID Bawaslu Katingan berusaha untuk terus meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik, memperbaiki kualitas pelayanan informasi, dengan melengkapi sarana dan prasarana PPID. Berkoordinasi dengan masing-masing divisi agar dapat menginventarisir dan mendigitalisasi data yang dimiliki.

Digitalisasi menjadi salah satu prioritas untuk “menyelamatkan” data dan dokumen yang ada. Jangan sampai dokumen dan data yang ada hilang begitu saja karena tidak ada versi digitalnya serta terus mendorong dan melakukan evaluasi dan monitoring pelayanan PPID dilingkup Bawaslu Katingan dengan memaksimalkan Bimbingan Teknis (Bimtek) Petugas PPID Bawaslu Kabupaten Katingan. Program ini untuk memastikan PPID Bawaslu kabupaten/kota bisa lebih baik.

Bawaslu Kabupaten Katingan juga merekomendasikan kepada Jajaran dibawahnya yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk berperan aktif menyampaikan berbagai informasi terkait tahapan dan program/kegiatan pengawasan dan kehumasan melalui Media Online/Media Sosial demi terciptanya keterbukaan informasi bagi Publik.

LAMPIRAN

